



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

| | |
|------------------|---|
| Rapat ke | : 9 (Sembilan) |
| Tahun Sidang | : 2022-2023 |
| Masa Persidangan | : V |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI |
| Hari, Tanggal | : Senin, 5 Juni 2023 |
| Pukul | : 11.00 WIB |
| Sifat Rapat | : Terbuka. |
| Pimpinan Rapat | : Aria Bima/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI. |
| Sekretaris Rapat | : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 |
| A c a r a | : Pembahasan mengenai : <ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan RKP dan RKAKL Tahun Anggaran 2024;2. Evaluasi Pelaksanaan anggaran TA 2022 dan realisasi anggaran semester I 2023;3. Pelaksanaan Progress PMN Tahun Anggaran 2023;4. Pelaksanaan PMN untuk PT Aviata/Injourney, PT BPU/IFG dan PT RIU, PT RNI TA 2023;5. Usulan PMN TA 2024; dan6. Lain-lain |
| Hadir | : 1. 35 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri BUMN RI, Bapak Erick Thohir; Beserta jajaran. |

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI pada pukul 11.27 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat di Skor pukul 12.05 WIB dan dicabut kembali pada pukul 12.15 WIB.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 5 Juni 2023, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sebesar Rp255.661.469.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp185.454.545.000,- (*Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*)
 - b. Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN sebesar Rp70.206.924.000,- (*Tujuh Puluh Miliar Dua Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*)
2. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian BUMN RI Tahun 2024 sebesar Rp56.477.660.000,- (*Lima Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) Untuk memenuhi kebutuhan kegiatan prioritas yang belum terakomodir.
3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan PMN TA 2023 yang berasal dari Alokasi Pembiayaan Cadangan Investasi APBN 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG sebesar Rp3.000 Miliar dalam rangka penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya
 - b. PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)/InJourney sebesar Rp1.193 Miliar dalam rangka pembangunan infrastruktur KEK Mandalika dan Sanur
 - c. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp 1.000 Miliar dalam rangka *risk mitigation* perusahaan reasuransi dalam negeri
 - d. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp 500 Miliar dalam rangka investasi dan modal kerja
4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan PMN Tunai Tahun Anggaran 2024 dari Kementerian BUMN, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp 10 Triliun yang akan digunakan untuk pencapaian target rasio elektrifikasi

- b. PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp 10 Triliun yang akan digunakan untuk pendanaan masa operasi dan sebesar Rp 12,5 Triliun akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan ruas tol Bogor – Ciawi – Sukabumi dan Kayu Agung – Palembang – Betung
 - c. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp4 Triliun yang akan digunakan untuk pembelian 3 unit kapal penumpang untuk rute perintis
 - d. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG sebesar Rp 3 Triliun yang akan digunakan untuk kapasitas pinjaman KUR dan sebesar Rp 3,56 Triliun yang akan digunakan untuk penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya (dana berasal dari asset sitaan tipikor)
 - e. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 3 Triliun yang akan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas produksi
 - f. PT Rekayasa Industri sebesar Rp 2 Triliun yang akan digunakan untuk dukungan atas restrukturisasi struktur permodalan
 - g. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp 1,9 Triliun yang akan digunakan untuk penyertaan kepada anak perusahaan dalam rangka investasi dan modal kerja
 - h. PT Wijaya Karya (Persero) sebesar Rp 8 Triliun yang akan digunakan untuk penyehatan struktur permodalan
5. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan PMN Non Tunai Tahun Anggaran 2024 dari Kementerian BUMN, dengan perincian sebagai berikut:
- a. PT Len Industri (Persero)/Defend ID sebesar Rp 649 Miliar yang akan digunakan untuk penguatan struktur permodalan
 - b. PT Varuna Tirta Prakarsa (Persero) sebesar Rp 24,13 Miliar yang akan digunakan untuk penguatan struktur permodalan
6. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.34 WIB.

MENTERI BUMN RI

Ttd.

ERICK THOHIR

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**ARIA BIMA
A-189**